

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Sebagai kesimpulan penulis menyampaikan sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 adalah pertama faktor *idealisme* dalam politik identitas etnis Tionghoa dalam Pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 sangat terlihat faktanya di lapangan dan yang berani menunjukkan idealisme hanya segelintir saja. Kelompok etnis Tionghoa ingin memperbaiki relasi sosial dengan kelompok etnis yang ada di Kota Singkawang mengingat realitas masyarakatnya pluralistik.

Sebagai warga negara Indonesia yang sah, warga kelompok etnis Tionghoa untuk terjun di bidang politik sebenarnya merupakan haknya yang normal dan dijamin oleh konstitusi. Namun, yang tidak wajar manakala etnis Tionghoa menjadi anggota legislatif atau kepala daerah menggunakan faktor idealisme merujuk kearah yang negatif, sehingga dalam mengambil kebijakan menjadi tidak adil. Hal itu akan berat pada kelompok etnisnya sendiri dan diragukan kemampuannya ketika etnis Tionghoa yang memimpin di Kota Singkawang oleh pihak kelompok etnis yang lain.

Kedua faktor *pragmatisme* pada politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 sangat sedikit dan tidak begitu terlihat

dengan jelas. Hal ini disebabkan sudah banyak masyarakat etnis Tionghoa yang paham dengan politik dan UU yang telah mengizinkan etnis Tionghoa untuk berdemokrasi memperjuangkan hak-haknya. Dengan begitu etnis Tionghoa yang duduk di legislatif dapat berkomunikasi dengan masyarakat etnis Tionghoa dengan lebih lancar sehingga, masyarakat etnis Tionghoa bisa menyampaikan aspirasinya tanpa ada rasa segan.

Ketiga faktor kekuasaan politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilu pada Kota Singkawang tahun 2017 sangat terlihat jelas dalam mempengaruhi untuk memenangkan pemilu pada di Kota Singkawang. Terbukti bahwa keterlibatan etnis Tionghoa dalam politik di Kota Singkawang adalah kekuasaan, karena jika sudah masuk ke dalam pelaku kekuasaan dapat ikut mengatur atau menata program pembangunan yang dianggap sangat baik bagi rakyat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, menjalankan kekuasaan dengan berlandaskan etika dan moral yang berlaku. Artinya bahwa kebijakan seorang yang mempunyai kekuasaan harus dalam diterima oleh semua golongan di dalam masyarakat yang berada di bawah kekuasaannya karena perumusan dan pelaksanaannya berdasarkan aturan hukum, bukan hanya dengan kekuasaan belaka.

**2.** Politik Identitas etnis Tionghoa dalam pemilu pada Kota Singkawang tahun 2017 dapat dilihat dari tiga indikator yakni :

Pertama, narasi besar dari keseluruhan program yang sudah di susun dengan rapi dan bagus sebagian besar hanya sebuah narasi besar. Hal ini disebabkan minimnya uang untuk mensukses program dalam

kampanye serta sangat pentingnya uang agar program yang telah dibuat tidak menjadi narasi besar. Oleh sebab itu, pasangan calon maupun tim sukses harus bisa berinisiatif untuk mendapatkan asupan uang agar dalam melaksanakan program atau rencana tersebut bisa berjalan sebagaimana yang di harapkan.

Kedua, *Apartheid terbalik* dalam penggunaan politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 terjadinya *Apartheid* terbalik. Hal ini sangat jelas bahwa yang memenangkan pemilukada tahun 2017 adalah dari etnis Tionghoa. Pada pemilukada 2017 ini pengecualian etnis bukan lagi menjadi strategi ambisius, tetapi pahamnya masyarakat Tionghoa dengan maksud dan tujuan untuk masuk ke dalam dunia politik.

Tidak ada deskriminasi ras pada saat pemilukada tetapi, deskriminasi terjadi dilakukan oleh oknum-oknum dan di pelayanan masyarakat langsung kepada masyarakat etnis Tionghoa yang tidak paham sama sekali dengan aturan yang ada di pelayanan. Peristiwa ini sangat disayangkan terjadi, melihat Kota Singkawang merupakan kota yang memiliki masyarakat realitas pluralistik.

Ketiga, Kelompok Khusus penggunaan politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 tidak adanya kelompok khusus yang di istimewa, karena bagi pasangan calon walikota maupun tim sukses yang terpenting ialah suara dari masyarakat,

tidak memandang etnis, suku, dan agama karena semuanya sama. Dalam konteks yang lain terlihat sangat jelas, kelompok etnis Tionghoa mengistimewakan diri pada event Cap Go Meh. Etnis Tionghoa memeriahkan event Cap Go Meh tersebut dikarenakan walikota terpilih tahun 2017 merupakan dari kelompok etnis Tionghoa.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa hal politik identitas etnis Tionghoa dalam pemilukada Kota Singkawang tahun 2017 yang perlu di perbaiki agar lebih baik kedepannya. Penggunaan faktor kekuasaan pada politik identitas etnis Tionghoa jangan dijadikan sebagai alat kebutuhan, tetapi menjadikan kekuasaan yang dapat diterima oleh semua golongan di dalam masyarakat yang dibawah kekuasaannya.
2. Meninjau dan memperhatikan kebutuhan untuk mensukseskan program pada kampanye pemilukada selanjutnya agar tidak terulang kembali sebagai wacana belaka. Serta bersikap netral bagi calon pasangan, tim sukses maupun masyarakat kelompok tertentu dalam

bersikap di dunia politik maupun konteks lainnya, agar tidak menyebabkan rusaknya harmonisasi sosial.

3. Untuk peneliti selanjutnya hal yang perlu di dalam adalah terkait sejarah etnis Tionghoa di Kota Singkawang dan faktor penggunaan politik identitas etnis Tionghoa, dikarenakan pasti mengalami perubahan baik secara signifikan maupun tidak pada saat pemilukada.